

EVALUASI PELAYANAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) PADA DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JAWA TIMUR

Eko Suwanto¹⁾, Priyanto²⁾

^{1) 2)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: ekosuwanto655@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai instansi yang melayani kepentingan publik. Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim beserta jajarannya berkewajiban untuk menyelenggarakan Good governance. Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik ditentukan terutama oleh perilaku aparat yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan tugas Ditlantas yang salah satu aktivitasnya adalah menerbitkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Salah satu fungsi Seksi Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja organisasi Seksi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dengan bentuk variabel good Governance. Hasilnya Evaluasi Pelayanan pembuatan BPKB berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 di Dirlantas Polda Jawa Timur sejauh ini berjalan kurang baik karena belum meratanya aturan yg berlaku. Dan penerapan pembuatan BPKB di Satuan Lalu lintas Polda Jawa Timur masih ditemui hambatan-hambatan diantaranya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pembuatan BPKB, biaya yang dikenakan, dan kelengkapan persyaratan administrasi.

Kata kunci: pelayanan publik, evaluasi pelayanan, BPKB

ABSTRACT

As an agency that serves the public interest. The East Java Police Traffic Directorate and its staff are obliged to organize good governance. The success of good governance is determined primarily by the behavior of the apparatus involved in the process of providing services to the community. In carrying out the duties of the Traffic Directorate, one of its activities is to issue Motor Vehicle Owner's Books (BPKB). One of the functions of the Motor Vehicle Owner Book Issuance Section of the East Java Regional Police Traffic Directorate. The type of research used in this research is qualitative research. This research analyzes the implementation of the principles of good governance on the organizational performance of the Motor Vehicle Owner's Book Section (BPKB) of the East Java Police Traffic Directorate with the form of good governance variables. The result is that the evaluation of BPKB making services based on Government Regulation No. 60 of 2016 at Dirlantas Polda East Java has so far run less well because the rules have not been evenly applied. And the application of BPKB making in the East Java Regional Police Traffic Unit still encounters obstacles including the lack of public understanding of the BPKB making procedure, the fees charged, and the completeness of administrative requirements.

Keywords: public service, service evaluation, BPKB

A. LATAR BELAKANG

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan suatu organisasi bidang pelayanan publik sebagai alat negara yang memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Polri dilakukan dengan menerapkan dan melaksanakan *good governance* yang lebih baik enggan melakukan banyak pembenahan yang sangat mendasar terhadap sistem birokrasi dengan memangkas berbagai jalur birokrasi agar lebih efektif dan efisien.

Sebagai instansi yang melayani kepentingan publik. Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim beserta jajarannya berkewajiban untuk menyelenggarakan *Good governance*. Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik ditentukan terutama oleh perilaku aparat yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Pentingnya fungsi dan peran Pelayanan Polri, maka yang menjadi obyek dalam penelitian ini yaitu Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolri yang perannya menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi : Pendidikan Masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas), Penegakan Hukum, Pengkajian Masalah Lalu Lintas, Administrasi Regident Pengemudi serta Kendaraan Bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltibcarlantas.

Dalam melakukan tugas Ditlantas yang salah satu aktivitasnya adalah menerbitkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Salah satu fungsi Seksi Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur yang bertugas: (1) membantu untuk menyelenggarakan administrasi dan identifikasi kendaraan bermotor baru, (2) membantu Kasubdit Regident dalam hal membina dan menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), (3)

menyelenggarakan administrasi registrasi dan identifikasi balik nama kendaraan bermotor, (4) menyelenggarakan administrasi registrasi dan identifikasi penggandaan (Duplikat).

Upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, maka perlu ditunjang oleh penerapan Prinsip *Good Governance* pegawai. Dimana kinerja pegawai yang merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing bagian dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika, Sinambela (2012:5).

Pentingnya dalam melakukan penerapan Prinsip *Good Governance* pegawai dalam suatu organisasi, maka perlunya dilakukan pengukuran kinerja. Sedarmayanti (2016:219) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dengan melakukan pengukuran kinerja.

Fenomena yang terjadi selama ini khususnya dalam pemberian pelayanan prima pada Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dapat meliputi: (1) Kualitas pendidikan dan latihan masih ada sebagian kecil yang di dasarkan pada selera Pimpinan, Like and dislike, dan kurang mengindahkan kompetensi, kinerja dan potensi anggota dalam proses penunjukan, (2) Kondisi penggunaan masih adanya hak Prerogatif Pimpinan yang disalah gunakan sehingga dapat mengganggu sistem manajemen SDM terutama pada proses penempatan dalam jabatan dan personil yang kadangkala mengabaikan prestasi anggota, (3) Penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas personil belum efisien dan efektif, Adanya kebiasaan masyarakat yang selalu ingin menyelesaikan masalah dengan cepat tanpa melalui prosedur yang sebenarnya.

Dampak ketidakpuasan ini berpengaruh kepada loyalitas masyarakat pada Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur khususnya di Seksi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Kebijakan pemerintah mengenai peningkatan pelayanan publik adalah untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat sehingga mereka merasa puas. Ketika suatu institusi mencari cara untuk meningkatkan pelayanan, mereka biasa memulainya dengan hal-hal yang dapat mereka lakukan kepada pelanggan mereka. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Evaluasi layanan Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur”**.

B. LANDASAN TEORI

1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno(2008:166).

Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan

James Anderson dalam Winarno (2008 : 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagaiberikut:

a. Tipe pertama Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

b. Tipe kedua Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya

kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

c. Tipe ketiga Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Berdasarkan ketiga tipe tersebut yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis, di mana peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan BPKB, dengan mencari tahu apakah kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuanyang telah ditetapkan.

Fungsi Evaluasi Kebijakan

Menurut Samudra dkk dalam Nugroho (2003:186-187), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

- Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya.
- Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakantersebut.

Kriteria Evaluasi Dampak Kebijakan

- Efektivitas
- Efisiensi

- c. Kecukupan
- d. Perataan
- e. Responsivitas
- f. Ketepatan

2. Pelayanan Publik

Pengertian pelayanan menurut American Marketing Association, seperti dikutip oleh Donald (Hardiansyah 2011:10), bahwa pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud sertatidakmenghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya juga mungkin tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.

Strategi penyusunan standar pelayanan prima: a. Identifikasi siapa yang menjadi pelanggan pada tiap jenis layanan. b. Memahami apa yang dibutuhkan pelanggan. c. Identifikasi jenis pelayanan. d. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk keperluan pelayanan. e. Sistem dan prosedur mendapatkan pelayanan. f. Menetapkan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang menangani pelayanan. g. Menetapkan jenis dan jumlah peralatan yang diperlukan/dipakai. h. Menetapkan standar waktu penyelesaian pelayanan. i. Menetapkan standar harga/biaya yang diperlukan dalam tiap jenis pelayanan (bila ada) j. Petugas yang menerima keluhan/kontak person, dan lainnya.

Definisi pelayanan publik menurut Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 mengelompokkan tiga pelayanan dari instansi serta BUMN/BUMD. Pengelompokkan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri- ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu (1) pelayanan administratif, (2) pelayanan barang, (3) pelayanan jasa. Pelayanan publik

adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat (Panji Santosa 2009:57).

Dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 13 2003, dalam Mukarom dan Laksana (2018:84) bahwa, prinsip penyelenggara pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Kesederhanaan.
2. Kejelasan.
3. Kepastian Waktu.
4. Akurasi.
5. Keamanan.
6. Tanggung jawab.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana.
8. Kemudahan akses
9. Kedisiplinan.
10. Kenyamanan.

Indikator Kualitas Pelayanan Kualitas pelayanan menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry mempunyai indikator- indikator sebagai berikut:

1) Ketampakan fisik (Tangible)

Merupakan salah satu faktor penting untuk menilai suatu kualitas. Dimensi ketampakan fisik ini mengacu pada ketersediaan fasilitas, seperti peralatan, personil dan hal fisik lainnya.

2) Keandalan (Reliability)

Yaitu berkenaan dengan konsisten atau tidaknya dalam melayani. Dimensi ini digunakan oleh instansi untuk mengukur aspek-aspek dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.

3) Tanggapan (Responsif)

Dimensi ini merupakan dimensi yang paling dinamis. Dalam dimensi ini diharapkan respon yang cepat untuk menanggapi keluhan. Dimensi tersebut mencakup kejelasan informasi waktu penyampaian jasa sejak awal, kesediaan penyelenggara yang selalu membantu penerima pelayanan, dan

kekurangan (ketersediaan) waktu pegawai untuk menanggapi permintaan pelanggan.

4) Jaminan (Assurance)

Yaitu berkenaan dengan pengetahuan dan sejauh mana kemampuan petugas pemberi layanan dalam memberikan layanan kepada masyarakat agar terciptanya kepercayaan masyarakat kepadapenyelenggara.

5) Empati (Empathy)

Yaitu berkenaan dengan perilaku perhatian, dan kepedulian petugas penyelenggara layanan secara individu kepada masyarakat.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana data pada umumnya berbentuk uraian atau kalimat-kalimat, merupakan informasi mengenai keadaan sebagaimana adanya sumber data dalam hubungannya dengan masalah yang diselidiki (Hadari Nawawi, 2006:211). Oleh karena itu, melalui penggunaan pendekatan studi kasus dan fenomenologi data deskriptif yang dihasilkan dapat berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku.

Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja organisasi Seksi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dengan bentuk variabel good Governance.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu batasan masalah dalam penelitian kualitatif yang masih bersifat tentative yang artinya menyempurnakan fokus masalah penelitian ini masih tetap dilakukan dan akan berkembang atau berubah setelah penelitian ini turun di lapangan.

Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi

yang baru diperoleh dilapangan. Sehingga peneliti memfokuskan penelitian terhadap masalah-masalah yang menjadi tujuan dari penelitian dan dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan data mana yang akan dibuang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan dari adanya masalah yang ditemukan di Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur yaitu adanya sejumlah aduan masyarakat tentang lambatnya pelayanan publik terutama pada pelayanan Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur. Terkait hal tersebut Direktorat lalu Lintas merupakan badan publik yang berkewajiban dalam melaksanakan keterbukaan informasi pelayanan publik terkait pelayanan Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

4. Subyek Penelitian/Informan

Informan kunci adalah orang yang mempunyai pengetahuan luas tentang Pelayanan Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur.

5. Sumber Data dan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung dari informan dengan menggunakan teknik wawancara (interview guide) dan pengamatan (observasi). Selama penelitian ini berlangsung telah ditemui dan mewawancarai s di Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur sejumlah informan yang terdiri

atas informan kunci, informan ahli dan informan biasa.

Sementara data sekunder yang dimaksudkan adalah data yang diperoleh dari pengkajian bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, makalah, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen pada instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian sebagai sumber data karena data dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsir, bahkan meramalkan.

6. Prosedur Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Observasi,
Observasi, dilakukan untuk mendapatkan gambaran terhadap permasalahan yang diteliti dengan cara melakukan pengamatan obyek secara langsung selama pengumpulan data. Melalui metode ini, realitas dan konteks penelitian dapat dipahami secara mendalam. Obyek-obyek yang diobservasi terdiri dari kondisi lingkungan dari aktivitas sosial dan aktivitas lainnya.
2. Teknik Wawancara
Wawancara, yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan wawancara berpedoman (terikat). Pengumpulan data dengan wawancara berpedoman didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Sedangkan wawancara bebas dan mendalam adalah pertanyaan pengembangan dari pertanyaan terikat yang tidak disiapkan sebelumnya baik kepada Petugas Seksi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, kepada masyarakat Pemohon Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan kepada LSM atau

wartawan.

2. Dokumentasi

Adapun pengumpulan data dengan melihat dan mempelajari dokumen-dokumen tertulis mengenai keadaan lokasi penelitian. Studi tersebut dilakukan baik di lokasi penelitian maupun di tempat-tempat lain dimana data tentang objek yang diteliti dapat diperoleh.

3. Partisipasi

Partisipatif adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan cara perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini ikut berperan serta dalam Pelayanan Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, data yang diperoleh melalui wawancara bebas dan berstruktur serta observasi berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu: Untuk mengetahui bagaimana evaluasi layanan Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai dengan jenis penelitian. Adapun teknik penelitian yang dimaksudkan adalah teknik pengamatan (observasi) dan teknik wawancara mendalam (in depth interview), serta dokumentasi dan perekaman.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

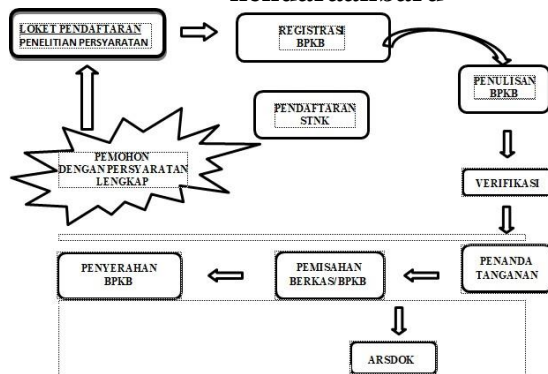
Pembahasan

Buku Pemilik kendaraan Bermotor atau disingkat BPKB adalah buku yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB berfungsi sebagai surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor

serta diberikan STNK dan TNKB. Spesifikasi teknis dan pengadaan BPKB ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. BPKB merupakan salah satu dari certificate of ownership yang termasuk dalam dokumen penting yang dapat dijadikan menjadi sebagai jaminan. Buku ini diberikan bersamaan dengan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Dalam proses permohonan penerbitan BPKB terdapat mekanisme atau alur yang harus dilewati untuk dapat menerima BPKB baru pemohon disini diharapkan sudah memenuhi persyaratan lengkap. Mekanismenya sebagai berikut:

Gambar 4.1 mekanisme BPKB kendaraan baru



Sumber: Polda Jatim

Mekanisme yang harus dilalui oleh pemohon BPKB berupa dari mendaftar di Loker pendaftaran di sini juga akan diteliti persyaratan untuk pengurusan BPKB kemudian setelah kiranya persyaratan sudah benar maka pemohon di arahkan untuk melakukan registrasi membayar biaya PNBPK BPKB bersamaan dengan itu pemohon mendapat bukti kwitansi pembayaran dan resi pengambilan setelah itu berkas pengajuan BPKB akan melalui tahap proses input data, dan print cetak BPKB kemudian BPKB yang sudah tercetak akan diajukan ke Pejabat berwenang (Kapolres) untuk ditandatangani setelah selesai di tandatangan antara berkas/arsip akan dipisahkan dengan BPKB nya berkas masuk ke bag. Arsip sementara BPKB yang sudah jadi diserahkan kepada pemohon.

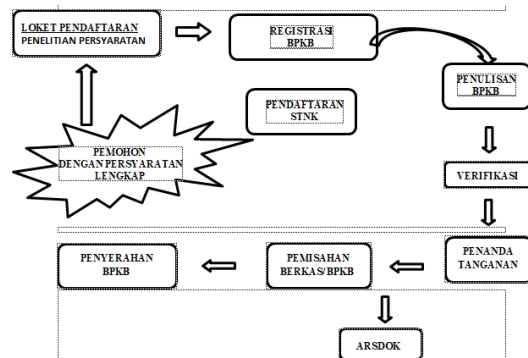
Persyaratan Penerbitan BPKB Kendaraan Baru:

Persyaratan penerbitan BPKB kendaraan baru yang harus dipenuhi oleh pemohon agar BPKB dapat diterbitkan meliputi:

- Mengisi formulir permohonan;
- Faktur Untuk BPKB
- Sertifikat NIK dari Agen Pemegang Merek (APM), kecuali Ranmor khusus tanpa sertifikat NIK.
- Cek Fisik kendaraan (No. Rangka dan No. Mesin)
- Melampirkan tanda bukti identitas.

Dalam proses permohonan penerbitan BPKB terdapat mekanisme atau alur yang harus dilewati untuk dapat menerima BPKB baru pemohon disini diharapkan sudah memenuhi persyaratan lengkap. Mekanismenya sebagai berikut :

Gambar 4.2 Mekanisme Penerbitan



Sumber: polda jatim

Persyaratan Penerbitan BPKB Pemindahtanganan:

Penerbitan BPKB pemindahtanganan kepemilikan di dalam satu wilayah Regident Ranmor (Ganti Pemilik) harus memenuhi persyaratan meliputi :

- Mengisi formulir permohonan.
- Melampirkan tanda bukti identitas

Tabel 4.1 Tarif PNPB Penerbitan BPKB

Jenis BPKB	Tarif PNPB BPKB
R2 Kendaraan Baru	Rp. 225.000
R2 Ganti Kepemilikan	Rp. 225.000
R2 Mutasi Masuk	Rp. 225.000
R4 Kendaraan Baru	Rp. 375.000
R4 Ganti Kepemilikan	Rp. 375.000
R4 Mutasi Masuk	Rp. 375.000

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016

Proses Penerbitan BPKB

Proses penerbitan BPKB didalam kantor Satlantas Polres Tegal melalui banyak kegiatan atau urutan identifikasi dan verifikasi yang meliputi :

1. Proses penerbitan BPKB dilaksanakan oleh petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi berdasarkan permohonan.
2. Setelah menerima permohonan, petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi melakukan:
 - a. penelitian kelengkapan dokumen persyaratan, asal-usul Ranmor, kelaikanRanmor, dan/atau kepemilikan Ranmor;
 - b. pengecekan keabsahan dokumen persyaratan melalui instansi ataulembaga yang mengeluarkan dokumen Ranmor;
 - c. pencocokan hasil Pemeriksaan Cek FisikRanmor dengan berkas;
 - d. pengecekan kesesuaian antar dokumen asal-usul, kelaikan dan kepemilikan Ranmor.
3. Dalam hal terdapat persyaratan permohonan yang diajukan tidak lengkap dan/atau tidak sah, petugas memberitahukan dan mengembalikan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan.
4. Dalam hal persyaratan permohonan yang diajukan sudah lengkap dan sah, petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi melakukan:

- a. memilah dokumen persyaratan untuk:
 1. proses penerbitan BPKB; dan
 2. proses penerbitan STNK;
- b. menyampaikan dokumen persyaratan kepada petugas kelompok kerja pendaftaran BPKB;
- c. menyampaikan dokumen persyaratan kepada petugas kelompok kerja pendaftaran, pendataan dan verifikasi di Samsat; dan
- d. memberitahukan kepada petugas kelompok kerja penerimaanpembayaran PNPB Penerbitan BPKB.
- e. atas dasar pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d diatas, Petugas kelompok kerja penerimaan pembayaran memberitahukan kepada pemohon untuk melakukan pembayaran PNPB penerbitan BPKB melalui Bank yang ditunjuk.
5. Tanda bukti pembayaran diserahkan kepada kelompok kerja pendaftaran dan kepada pemohon diberi Tanda Bukti Pendaftaran yang berisi identitas pemilik, Ranmor, dan nomor urut pendaftaran.
6. Setelah Tanda Bukti Pendaftaran diterima, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan STNK ke Samsat.
7. Petugas kelompok kerja pendaftaran, setelah menerima dokumen persyaratan melakukan kegiatan:
 - a. memasukan data fisik berupa identitas dan fungsional Ranmor serta data yuridis berupa asal-usul dan identitas pemilik Ranmor secara manual ke dalam Buku Register serta secara elektronikdalam pangkalan data sistem informasi dan komunikasi Regident Ranmor;
 - b. penetapan nomor registrasi Ranmor dan nomor BPKB yang berfungsi sebagai identitas Ranmor dan alat kontrol penegakan hukum;
 - c. pencetakan kartu induk BPKB yang berisi data identitas, fungsional, asal-usul dan pemilik Ranmor serta nomor

- registrasi; dan
- d. pembubuhan paraf dalam Kartu Induk BPKB.
8. Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor (7), petugas kelompok kerja pendaftaran menyampaikan berkas dan/atau data penerbitan BPKB kepada kelompok kerja:
- penerbitan dan pemberian BPKB;
 - pengarsipan BPKB;
 - pendaftaran, pendataan dan verifikasi di Samsat; dan
 - pencetakan TNKB.
9. Petugas pada kelompok kerja penerbitan dan pemberian BPKB melakukan kegiatan:
- pemasukan data tanda tangan elektronik pejabat yang berwenang;
 - pencetakan dan penerbitan BPKB;
 - pengajuan BPKB pada pejabat verifikator untuk verifikasi tandatangan elektronik;
 - penerimaan BPKB yang telah diverifikasi; dan
 - penyerahan BPKB yang telah diberi tanda tangan elektronik kepada pemohon.
10. Penyerahan BPKB sebagaimana dimaksud pada nomor (9) huruf e, dilakukan dengan meminta pemohon menyerahkan fotokopi STNK dan menandatangani Buku Register penyerahan BPKB.
11. Petugas kelompok kerja pengarsipan setelah menerima data dan berkas BPKB melakukan pencatatan, pendataan arsip, kemudian penataan dan penyimpanan arsip.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan kesimpulan dalam penelitian ini adalah Evaluasi Pelayanan pembuatan BPKB berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 di Dirlantas Polda Jawa Timur

sejauh ini berjalan kurang baik karena belum meratanya aturan yg berlaku. Dan penerapan pembuatan BPKB di Satuan Lalu lintas Polda Jawa Timur masih ditemui hambatan-hambatan diantaranya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pembuatan BPKB, biaya yang dikenakan, dan kelengkapan persyaratan administrasi.

Saran

Saran bagi Dirlantas Polda Jawa Timur:

- Pengawasan terhadap pegawai diloket pendaftaran maupun pemohon pada saat pendaftaran sebaiknya ditingkatkan lagi agar tidak ada kecurangan-kecurangan yang terjadi dan masyarakat bisa mengikuti prosedur yang berlaku di lingkungan Kantor Dirlantas Polda Jawa Timur dan tidak merasa dirugikan.
- Masyarakat hendaknya berpartisipasi aktif dan turut serta dalam setiap prosedur dan mekanisme dalam pembuatan BPKB. Peran sertapartisipasi aktif dari masyarakat akan sangat membantu pelaksanaan pembangunan pelayanan di Dirlantas Polda Jawa Timur. Lebih diperketat lagi dalam pengawasan terhadap dokumen pemohon yang mengajukan penerbitan BPKB baik di segi persyaratan administratif maupun teknis, agar tidak ada lagi kesalahan ataupun kekurangan dan BPKB bisa jadi tepat waktu.
- Meningkatkan zona integritas agar tidak adanya pungli atau korupsi di pelayanan penerbitan BPKB

Saran bagi Peneliti selanjutnya :

- Penelitian ini masih banyak keterbatasan, baik dari segi tahun penelitian yang hanya terbatas tahun dan sampel yang diambil, serta pembahasan yang hanya berfokus pada penerbitan BPKB. Oleh karena itu diperlukan ruang lingkup yang lebih

luas baik objek, tahun, dan sampel yang diambil, karena beda ruang lingkup maka hasilnya bisa berbeda.

2. Untuk penelitian selanjutnya peneliti berharap dapat menambah variabel yang diteliti seperti STNK, SIM, dan TNKB yang berada di ruang lingkup Dirlantas Polda Jawa Timur.

REFERENSI

- Anggara, S. (2018). Pengantar Kebijakan Publik. CV Pustaka Setia.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UGM Press.
- Miles, M. ., & Huberman, A. . (1992). Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru (P. T. . Rohidi(ed.)). Universitas Indonesia.
- Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. Alfabeta.
- Subarsono, A. (2013). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Konsep Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2012). ANALISIS KEBIJAKAN Dari Formulasi ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik (F. Hutari (ed.)). Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Prasindo.
- Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Media Prasindo
- Amanda, P. I. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). The Journalish: Social and Government, 1(1), 34–38. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/>.
- Hafni, R., Sinulingga, N. S. B., & Hasibuan, L.S. (2021). Analisis Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung tunai dana desa pada ketahanan pangan di era pandemi (studi kasus Desa Simpang Empat, Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara). Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan, 2(1), 103–111.
- HANDAYANI, F. (2022). Implementasi Kebijakan Aplikasi Sipolima Pada Dinas Kominfo Kota Baubau Dalam Meningkatkan Kinerja Asn Ditengah Pandemi Covid-19. Doctoral Dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, 12, 12.
- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 81–90. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>
- Mais, R., Liando, D., & Pangemanan, F. (2019). Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung Ririn. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3(3), 1–9. <https://media.neliti.com/media/publications/103420-ID-pengaruh-aksesoris-dan-elemen-pembentuk.pdf>
- Mananeke, T. D. W., Rares, J. J., & Tampongangoy, D. (2019). Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Di Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung. Jurnal Administrasi Publik, 5(78), 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JA/P/article/viewFile/23821/23471>
- Mutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik (Issue April).